

Analisis Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Menggunakan Pendekatan *Value For Money* Pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo

Performance Measurement Analysis of Government Agencies Using a Value For Money Approach at the National Narcotics Agency of Gorontalo Province

Thessa Regisof Mega Wahiji¹, Herman Karamoy², Peter M. Kapojos³

^{1,2,3}Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi,
Jln. Kampus Bahu, Manado, 95115, Indonesia

E-mail : [1thessawahiji21@gmail.com](mailto:thessawahiji21@gmail.com), [2hkaramoy@yahoo.com](mailto:hkaramoy@yahoo.com), [3pmkapojos@gmail.com](mailto:pmkapojos@gmail.com)

Abstrak: Kinerja dari suatu instansi pemerintah sangatlah penting untuk mengetahui seberapa baik program maupun kegiatan yang terlaksana itu mengapa mengukur kinerja dari instansi pemerintah dilakukan. Penelitian ini dilakukan untuk mengukur kinerja instansi pemerintah dengan menggunakan pendekatan *Value For Money* pada instansi pemerintah yaitu Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja instansi pemerintah pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo periode tahun 2018 – 2020 ditinjau dari elemen ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan data untuk diteliti yaitu LAKIP dan Laporan Fisik dan Keuangan Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo periode tahun 2018 – 2020. Jenis Penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan menggunakan jenis data kuantitatif serta menggunakan pendekatan *Value For Money* dengan tujuan mengukur ekonomi, efisiensi, dan efektivitas yang ada pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa ditinjau dari elemen ekonomi pengukuran ekonomi periode tahun 2018-2020 dinyatakan ekonomis, ditinjau dari elemen efisiensi periode tahun 2018-2020 dinyatakan efisien, ditinjau dari elemen efektivitas hasil pengukuran kinerja periode tahun 2018-2020 dinyatakan efektif. Dari hasil analisis pengukuran kinerja pada instansi pemerintah Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo nilai dari tiga elemen yang ada yaitu ekonomi, efisiensi, efektivitas dinyatakan cukup baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo mampu menjalankan setiap program/kegiatan yang dimiliki.

Kata Kunci: Pengukuran Kinerja, *Value For Money*

Abstract: The performance of a government agency is very important to find out how well the programs and activities that are carried out are why measuring the performance of government agencies is carried out. This study was conducted to measure the performance of government agencies using the *Value For Money* approach to government agencies, namely the National Narcotics Agency of Gorontalo Province. This study aims to determine the performance of government agencies at the National Narcotics Agency of Gorontalo Province for the period 2018 - 2020 in terms of economic, efficiency, and effectiveness elements. This research is a descriptive study using data to be studied, namely LAKIP and the Physical and Financial Report of the National Narcotics Agency of Gorontalo Province for the period 2018 - 2020. The type of research used is qualitative using a qualitative descriptive approach and using quantitative data types and using a *Value For Money* approach. with the aim of measuring the economy, efficiency, and effectiveness of the Gorontalo Province National Narcotics Agency. The results of the study obtained that in terms of the economic elements of the economic measurement period 2018-2020 it was declared economical, in terms of the efficiency element the period 2018-2020 was declared efficient, in terms of the effectiveness element of the results of the performance measurement for the period 2018-2020 it was declared effective. From the results of the analysis of performance measurements at government agencies, the National Narcotics Agency of Gorontalo Province, the value of the three existing elements, namely economy, efficiency, and effectiveness is stated to be quite good. So it can be concluded that the National Narcotics Agency of Gorontalo Province is able to run every program/activity it has.

Keywords: Performance Measurement, *Value For Money*

PENDAHULUAN

Pengukuran kinerja perlu untuk menilai tanggung jawab organisasi untuk memberikan pelayanan publik lebih baik serta lebih terarah. Ukuran kinerja sektor publik melayani tiga tujuan. Pertama, ukuran kinerja sektor publik bertujuan agar membantu pemerintah meningkatkan kinerjanya.

Diterima: 18-07-2022; Disetujui untuk Publikasi: 19-07-2022

Hak Cipta © oleh Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum
p-ISSN: 24072-361X

Kedua, indikator kinerja sektor publik dipergunakan untuk alokasi sumber daya juga pengambilan keputusan. Ketiga, pengukuran kinerja sektor publik bertujuan agar mencapai akuntabilitas publik serta meningkatkan komunikasi organisasi. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diatur dalam PERPRES Nomor 29 Tahun 2014. SAKIP atau dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan suatu sistematis dari alat, prosedur, dan aktivitas yang telah dibuat agar mencapai suatu tujuan pengukuran serta penetapan, pengklasifikasian, pengumpulan data untuk suatu pertanggungjawaban juga peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mencapai hasil pengukuran yang objektif dan lengkap yang termasuk ciri-ciri nyata dan tidak berwujud, sistem pengukuran harus dirancang agar representatif dan aplikatif. Ada beberapa cara untuk mengukur kinerja yaitu *Balanced Scorecard* dan kinerja biaya (*Value For Money*). Metodologi *Balanced Scorecard* mengevaluasi melalui empat pendekatan atau perspektif: pendekatan keuangan, pendekatan konsumen, pendekatan perusahaan/internal (internal), serta pendekatan pembelajaran dan pertumbuhan. Rasio *value for money* terdiri ekonomi, efisien juga efektif. *Value For Money* adalah tujuan dari pengukuran kinerja di instansi pemerintah karena kinerja dari pemerintah bukan hanya bisa diukur dari segi *input*, *output*, melainkan dari hasilnya juga yang digabungkan.

Seluruh Kementerian/Lembaga diwajibkan melaporkan laporan kinerja pada Presiden sebagai pertanggungjawaban dari tugas pokok serta fungsional dari BNN. Sesuai PP Nomor 8 Tahun 2006 serta PERPRES Nomor 29 Tahun 2014. Karna itu untuk laporan kinerja Badan Narkotika Nasional seluruh satuan kerja pada lingkungan BNN wajib melaksanakan pelaporan tersebut. Laporan kinerja didasarkan dari Keputusan Kepala BNN Nomor 388 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan BNN, BNNP dan BNNK/Kota.

Seperti permasalahan yang terjadi saat ini yaitu BNN diminta untuk melakukan penghematan anggaran pada tahun 2021 untuk menanggulangi kejahatan narkoba di Indonesia. Anggaran BNN di tahun 2021 yaitu sebesar Rp.1.689.992.511.000,- (Satu Triliun Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Lima Ratus Sebelas Ribu Rupiah) atau lebih rendah Rp.72.757.509.000,- (Tujuh Puluh Dua Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Sembilan Ribu Rupiah) dibanding anggaran tahun 2020 sebelum adanya kebijakan penghematan, sedangkan BNN diperhadapkan dengan tantangan berkembangnya kejahatan yang semakin meningkat walaupun pada kondisi pandemi. Hal ini tentu merupakan permasalahan tersendiri yang harus dihadapi oleh BNN. Pengukuran kinerja ini akan berperan penting dalam menentukan kinerja dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo dalam melaksanakan program kegiatan pada periode tahun 2018-2020. Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui kinerja program kegiatan dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo berdasarkan konsep *Value For Money* diukur dari unsur Ekonomi, Efisiensi, juga Efektivitas. Dalam rangka mengetahui kinerja suatu instansi pemerintah peneliti menganalisis tentang “**Analisis Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Menggunakan Pendekatan *Value For Money* Pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo**”.

1.1 Akuntansi

Ikatan Akuntansi Indonesia (2019:2), menjelaskan pengertian dari akuntansi yaitu pengetahuan tentang mencatat, menganalisis, juga menghubungkan transaksi maupun peristiwa ekonomi dari bisnis, dan memiliki tujuan menghasilkannya suatu laporan dan melaporkan informasi yang relevan pada pihak yang memiliki kepentingan pada pengambilannya keputusan. Akuntansi dapat didefinisikan sebagai pelaksanaan pencatatan, penggolongan, serta penyusunan transaksi keuangan yang berlangsung secara sistematis dan kronologis dalam bentuk laporan keuangan untuk langkah pengambilan keputusan (Punairawan dan Sastroatmodjo 2021:1).

1.2 Akuntansi Pemerintahan

Menurut Fauzi dan Hasanah (2017:2), akuntansi pemerintahan merupakan tindakan memberikan layanan untuk penyediaan informasi keuangan pemerintah berdasarkan pendaftaran, klasifikasi, ringkasan dan interpretasi informasi keuangan.

1.3 Kinerja

Kinerja yaitu tingkat pencapaian dalam melaksanakan kebijakan/rencana/kegiatan untuk pencapaian visi serta misi, tujuan, sasaran organisasi di perencanaan strategis organisasi yang ada (Mahsun 2015:157). Kata kinerja dipergunakan untuk menyatakan tingkat pencapaian individu atau kelompok. Kinerja dapat diketahui jikalau individu maupun kelompok individu itu memiliki

standar dari keberhasilan yang sudah ditentukan sebelumnya. Menurut dari Indra Bastian (2015:274), kinerja yaitu suatu capaian pelaksanaan dari kegiatan untuk mewujudkan visi, misi, sasaran, serta tujuan di organisasi.

1.4 Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan pengevaluasian keberhasilan suatu pekerjaan dari sasaran serta tujuan yang dibuat, yaitu hasil: efisiensi dari pemakaian sumber daya yang efisien untuk produksi barang juga jasa; kualitas barang serta jasa (baiknya jika barang juga jasa diberikan pada pelanggan serta sejauh mana pelanggan puas akan itu); hasil dari kegiatan diperbandingkan dengan tujuan yang ingin dicapai; efektivitas dari tindakan dalam proses mencapai suatu tujuan. (Mahsun 2015:157).

1.5 Value For Money

Value For Money adalah metode pengelolaan lembaga publik didasarkan dari tiga unsur utama adalah ekonomi, efisiensi, juga efektivitas (Mardiasmo 2018:4). Sedangkan arti dari ketiga unsur tersebut adalah:

- a. Ekonomi merupakan interaksi dari pasar juga *input* pada barang juga jasa diperoleh dengan standar kualitas dari apa yang dicari dengan harganya yang terjangkau (Bastian: 2015:280). Pengertian dari ekonomi menurut Mardiasmo (2018:4) yaitu ketersediaan produk berkualitas dengan harga terendah. Ekonomi adalah perbandingan sumber daya juga nilai investasi yang dinyatakan pada satuan moneter. Di ekonomi terpaut sejauh apa lembaga pemerintah mengurangi sumber daya produksi sambil menghindari biaya yang tidak perlu. Sebuah kegiatan dikategorikan ekonomis asalkan bisa menghilangkan ataupun mengurangi pengeluaran yang kurang penting.
- b. Efisiensi merupakan interaksi dari *input* serta *output* pada barang juga jasa yang digunakan dan juga dibeli organisasi dalam pencapaian dari *output* yang ada (Bastian 2015:310). Mardiasmo (2018:7) menyampaikan bahwa efisiensi yaitu capaian dari keluaran secara maksimum dari masukan yang ada atau masukan yang digunakan rendah dalam mencapai keluaran tersebut. Sebuah program bisa dinyatakan efisien jika sasaran dapat tercapai dengan menggunakan sumber daya seminimal mungkin.
- c. Efektivitas ialah interaksi dari keluaran serta tujuan, dimana efektivitas dihitung dengan mengetahui berapa besar tingkatan keluaran, peraturan serta kebijakan organisasi dalam menggapai tujuannya yang sudah disetujui (Bastian 2015:310). Efektivitas merupakan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Mardiasmo (2018:4) yaitu tingkatan capaian pada hasil program untuk tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya. Sebuah program dinyatakan efektif bila program bisa dicapainya tujuan serta sasaran akhir kebijakan.

1.6 Langkah-Langkah Pengukuran Value For Money

a. Pengukuran Ekonomi

Pengukuran dari ekonomi meninjau informasi untuk dipakai. Pengukuran ekonomi memerlukan informasi anggaran pengeluaran serta realisasi anggaran. Agar mengetahui tingkatan keekonomisan dari anggaran dapat dilihat pada konsep penganggaran yang dibuat oleh organisasi sektor publik. Cara menghitung tingkat ekonomi yaitu (Mahmudi 2015:84):

$$\text{Ekonomi} = \frac{\text{Input}}{\text{Nilai Input}} \times 100\%$$

Input menurut Mardiasmo (2018:7) yaitu asal data dipakai agar mengimplementasikan strategi dan fungsi program. Jadi *input* pada penelitian ini yaitu realisasi anggaran, di mana realisasi anggaran ialah jumlah dana yang masuk ke dalam organisasi yang akan dipakai buat mencukupi kebutuhan organisasi. Angka *input* yaitu jumlah dana yang disediakan untuk organisasi dalam mencukupi kebutuhan organisasi. Sehingga nilai *input* pada penelitian ini bisa dinyatakan sebagai anggaran atau target.

Kriteria kinerja sektor publik yang dapat disebut ekonomis yaitu sebagai berikut (Mahsun 2016:186):

- a) Dinyatakan ekonomis apabila ditemukan nilai kurang dari 100%
- b) Dinyatakan ekonomis berimbang apabila ditemukan nilai sama dengan 100%
- c) Dinyatakan tidak ekonomis apabila ditemukan nilai lebih dari 100%

b. Pengukuran Efisiensi

Efisiensi dihitung menggunakan keluaran dan masukan. Makin tinggi *output* dibandingkan *input*, sehingga makin meningkat pula efisiensi dari organisasi. Tingkatan dari efisiensi diukur dengan rumus (Mahmudi 2015:85):

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Output}}{\text{Input}} \times 100\%$$

Output adalah hasil diperoleh dari aktivitas, program, serta kebijakan. Sehingga pada penelitian ini *output* dimaksud ialah hasil yang ada pada aktivitas. *Input* diperbandingkan dengan *output* agar menetapkan tingkatan efisiensi merupakan tingkat dari angka adalah hasil yang diperoleh dari dibandingkannya anggaran serta realisasi anggarannya.

Kriteria kinerja sektor publik yang dapat disebut efisien yaitu sebagai berikut (Mahsun 2016:187):

- a) Dinyatakan tidak efisien apabila ditemukan nilai kurang dari 100%
- b) Dinyatakan efisiensi berimbang apabila ditemukan nilai sama dengan 100%
- c) Dinyatakan efisien apabila ditemukan nilai lebih dari 100%

c. Pengukuran Efektivitas

Efektivitas yaitu tolak ukur keberhasilan atau kegagalan sebuah organisasi untuk mencapai tujuannya. Jika suatu organisasi berhasil memenuhi sasarannya, sehingga bisa dikatakan bahwa organisasi tersebut telah beroperasi secara efektif. Jadi efektivitas tidak menentukan mengenai berapa banyak biaya yang keluar selagi pencapaian tujuan tersebut. Tapi efektivitas melihat bagaimana organisasi tersebut sudah memenuhi tujuan yang diharapkan (Mardiasmo 2018: 134). Tingkat efektivitas bisa diukur melalui rumus (Mahmudi 2015:187):

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Outcome}}{\text{Output}} \times 100\%$$

Outcome yaitu dampak dari kegiatan program pada masyarakat, sementara *output* yaitu sebuah pencapaian dari suatu program yang dilaksanakan organisasi.

Kriteria kinerja sektor publik yang dapat disebut efektif yaitu sebagai berikut (Mahsun 2016:187):

- a) Dinyatakan tidak efektif apabila ditemukan nilai kurang dari 100%.
- b) Dinyatakan efektivitas berimbang apabila ditemukan nilai sama dengan 100%.
- c) Dinyatakan efektif apabila ditemukan nilai lebih dari 100%.

METODE PENELITIAN

2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian kualitatif dipakai untuk penelitian ini. Sugiyono (2017:9), menyatakan penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilandaskan oleh filsafat postpositivisme dipergunakan dalam meneliti di situasi objek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif serta hasil penelitian kualitatif bersifat agar memahami makna, memahami keunikan, mengkonstruksi fenomena, juga menemukan hipotesis.

2.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo bertempat di Jalan M. T. Haryono No.18, Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Gorontalo - 96112. Penelitian ini dilakukan pada 25 Juni 2021 sampai 25 Agustus 2021.

2.3 Jenis, Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang dipakai yaitu data kualitatif dan kuantitatif. Sumber data adalah data primer. Metode pengumpulan data adalah dokumentasi dan wawancara.

2.4 Metode dan Proses Analisis

Metode analisis pada penelitian yaitu deskriptif kualitatif untuk menguraikan secara rinci bagaimana Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo dalam melaksanakan program maupun kegiatan yang ada dan menganalisis apakah kinerja program atau kegiatan Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo telah memenuhi syarat *Value For Money*. Penelitian ini menggunakan proses

analisis yang dikemukakan oleh (Mails & Huberman dalam Sugiyono 2017: 132), adalah sebagai berikut :

1. (*Data Collection*) Pengumpulan Data
2. (*Data Reduction*) Reduksi Data
3. (*Data Disply*) Penyajian Data
4. (*Klasifikasi Data*) Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Penelitian

3.1.1 LAKIP Atau Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Narkotika Nasional

Provinsi Gorontalo

Sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah diwajibkan untuk melaksanakan penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) kepada Presiden, sebagai wujud kewajiban dari Instansi Pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan dipelaksanaan misi organisasi untuk mencapainya tujuan-tujuan serta sasaran yang sudah ditetapkan pada pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir tahun anggaran. Penyusunan LAKIP Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo didasarkan pada indikator kinerja yang sudah ditetapkannya pada Penetapan Perjanjian Kinerja Tahunan sesuai dengan sasaran juga tujuan yang telah direncanakan. Pada realisasi yang dilaporkan dalam LAKIP ini yaitu realisasi dari pelaksanaannya program serta kegiatan tiap tahunnya.

Berdasarkan wawancara bersama informan selaku Kepala Sub Bagian Perencanaan Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo diketahui bahwa penyusunan LAKIP biasanya dilaksanakan setelah tahun anggaran selesai. Pedoman dalam penyusunan LAKIP sendiri berdasarkan Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di PERMENPAN No 53 Tahun 2014. LAKIP BNN Provinsi Gorontalo dinilai oleh Badan Narkotika Nasional Pusat.

Untuk mencapai target dari indikator-indikator sasaran yang ada, maka diperlukan program maupun kegiatan-kegiatan yang menunjang keberhasilan dalam mencapai sasaran dan indikator sasaran. Berikut adalah Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo untuk mengetahui hasil evaluasi kinerja dari tiap-tiap kegiatan maupun program dari Tahun 2018-2020 :

Tabel 1. Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun 2018

NO	PROGRAM	FISIK			KEUANGAN		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan			100	141.654.000	141.626.891	99,98
2	Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia			100	71.050.000	70.396.450	99,08
3	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN			100	151.743.000	151.561.422	99,88
4	Pembinaan dan Pelaksanaan Kehumasan, Tata Usaha, Rumah Tangga, dan Pengelolaan Sarana Prasarana			100	1.718.375.000	1.712.318.896	99,65
5	Penyelenggaraan Advokasi Berwawasan Anti Narkoba			100	128.000.000	127.038.300	99,25
6	Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif Anti Narkoba			100	102.548.000	102.195.500	99,66
7	Penyelenggaraan Desiminasi Informasi P4GN			100	495.158.000	493.430.675	99,65
8	Pelaksanaan Laporan Informasi Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika			100	50.000.000	49.947.000	99,89

9	Pascarehabilitasi Penyalah Guna dan/atau Pecandu Narkoba	96	268.664.000	258.837.138	96,34
10	Penyelenggaraan Pemberdayaan Peran Instansi Serta Masyarakat	247	286.525.000	284.724.323	99,37
11	Pengawasan Tahanan, Barang Bukti, dan Penyidikan dan Pengelolaan Aset	100	102.309.000	102.309.000	100%
12	Penguatan Lembaga Rehabilitas Instansi Pemerintah	93,5	513.200.000	497.517.248	96,94
13	Penguatan Lembaga Rehabilitas Komponen Masyarakat	100	1.500.000	1.500.000	100%
14	Penyelidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika	288	760.000.000	759.801.420	99,97
JUMLAH		123,17	4.790.726.000	4.753.204.263	99,22

Sumber: Laporan Fisik dan Keuangan Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo

Tabel 2. Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun 2019

NO	PROGRAM	FISIK			KEUANGAN		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan			100	141.654.000	140.736.800	99,35
2	Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia			100	52.641.000	44.977.200	85,44
3	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN			100	131.303.00	130.428.000	99,33
4	Pembinaan dan Pelaksanaan Kehumasan, Tata Usaha, Rumah Tangga, dan Pengelolaan Sarana Prasarana			100	2.040.399.000	2.016.836.464	98,85
5	Penyelenggaraan Advokasi Berwawasan Anti NaOrkoba			100	75.000.000	74.077.600	98,77
6	Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif Anti Narkoba			100	110.133.000	109.729.900	99,63
7	Penyelenggaraan Desiminasi Informasi P4GN			100	534.620.000	533.967.504	99,88
8	Pelaksanaan Laporan Informasi Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika			100	50.000.000	50.000.000	100
9	Pascarehabilitasi Penyalah Guna dan/atau Pecandu Narkoba			106,5	171.122.000	170.166.600	99,44
10	Penyelenggaraan Pemberdayaan Peran Instansi Serta Masyarakat			100	202.034.000	201.939.700	99,95
11	Pengawasan Tahanan, Barang Bukti, dan Penyidikan dan Pengelolaan Aset			100	70.420.000	70.018.650	99,43
12	Penguatan Lembaga Rehabilitas Instansi Pemerintah			117,5	696.170.000	679.749.281	97,64
13	Penguatan Lembaga Rehabilitas Komponen Masyarakat			100	8.710.000	8.710.000	100
14	Penyelidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika			150	995.592.000	987.503.016	99,19
JUMLAH				105,28	5.279.798.000	5.218.840.715	98,85

Sumber: Laporan Fisik dan Keuangan Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo

Tabel 3. Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun 2020

NO	PROGRAM	FISIK			KEUANGAN		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan			100	143.276.000	139.486.600	97,36
2	Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia			100	42.675.000	38.944.600	91,24
3	Penyusunan dan Pengembangan			100	91.226.000	90.800.500	99,53

	Rencana Program dan Anggaran BNN				
4	Pembinaan dan Pelaksanaan Kehumasan, Tata Usaha, Rumah Tangga, dan Pengelolaan Sarana Prasarana	100	1.919.434.000	1.917.809.051	99,92
5	Penyelenggaraan Advokasi Berwawasan Anti NaOrkoba	100	37.606.000	35.972.400	95,66
6	Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif Anti Narkoba	100	66.000.000	64.750.900	98,11
7	Penyelenggaraan Desiminasi Informasi P4GN	100	99.408.000	99.310.700	99,90
8	Pelaksanaan Laporan Informasi Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	100	100.000.000	100.000.000	100
9	Pascarehabilitasi Penyalah Guna dan/atau Pecandu Narkoba	100	97.756.000	96.013.900	98,22
10	Penyelenggaraan Pemberdayaan Peran Instansi Serta Masyarakat	100	171.034.000	168.730.700	98,65
11	Pengawasan Tahanan, Barang Bukti, dan Penyidikan dan Pengelolaan Aset	100	108.090.000	108.054.250	99,97
12	Penguatan Lembaga Rehabilitas Instansi Pemerintah	100	538.767.000	529.070.695	98,20
13	Penguatan Lembaga Rehabilitas Komponen Masyarakat	100	120.220.000	116.084.450	96,56
14	Penyelidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika	200	620.592.000	620.474.300	99,98
15	Pengelolaan Informasi dan Edukasi P4GN	188	177.575.000	174.370.750	98,20
	JUMLAH	114,08	4.333.659.000	4.299.873.796	99,22

Sumber: Laporan Fisik dan Keuangan Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo

3.2 Pembahasan

3.2.1 Analisis *Value For Money* elemen Ekonomi

Tabel 4. Pengukuran Ekonomi Pada BNN Provinsi Gorontalo Tahun 2018-2020

Tahun	Nilai Input (Rp)	Input (Rp)	Tingkat Ekonomi (%)	Kriteria
2018	4.790.726.000	4.753.204.263	99,22	Ekonomis
2019	5.279.798.000	5.218.840.715	98,85	Ekonomis
2020	4.333.659.000	4.299.873.796	99,22	Ekonomis

Sumber: LAKIP BNN Provinsi Gorontalo yang di olah

Selanjutnya, berdasarkan kriteria ekonomi menurut Mahsun (2016:186) menegaskan bahwa pengukuran ekonomi dikategorikan ke dalam 3 kategori. Jika diperoleh hasil pengukuran ekonomi di bawah 100% kinerja tersebut dikatakan telah ekonomis sedangkan jika dihasilkan sama dengan 100% maka dikatakan bahwa kinerja kegiatan tersebut ekonomis berimbang, dan terakhir jika memperoleh di atas dari 100% maka dapat dikatakan bahwa kinerja tersebut tidak ekonomis. Dengan demikian berdasarkan hasil pengukuran yang ada di Tabel 1 serta dikaitkan dengan kriteria pengukuran ekonomi dari Mahsun (2016: 186) maka Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo mendapatkan nilai ekonomis karena pada keseluruhan program kegiatan dari periode tahun 2018-2020 mendapatkan nilai di bawah 100% yang artinya Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo mampu melakukan penghematan pada tiap-tiap program yang telah dilaksanakan.

3.2.2 Analisis *Value For Money* elemen Efisiensi

Tabel 5. Pengukuran Efisiensi Pada BNN Provinsi Gorontalo Tahun 2018-2020

Tahun	Input (%)	Output (%)	Tingkat Efisiensi (%)	Kriteria
2018	99,22	110,5	111,36	Efisien
2019	98,85	105,28	106,50	Efisien
2020	99,22	114,08	114,97	Efisien

Sumber: LAKIP BNN Provinsi Gorontalo yang di olah

Berdasarkan kriteria efisiensi menurut Mahsun (2016:187) menegaskan bahwa pengukuran efisiensi dikategorikan kedalam 3 kategori yaitu jika nilai yang dihasilkan lebih dari 100% maka kinerja kegiatan tersebut dapat dikatakan efisien, jika nilai yang dihasilkan sama dengan 100% maka kinerja kegiatan tersebut dikatakan efisien berimbang, dan jika nilai yang dihasilkan kurang dari 100% maka kinerja kegiatan tersebut dikatakan tidak efisien. Dengan demikian berdasarkan hasil yang ada pada Tabel 2 dikaitkan dengan kriteria pengukuran efisiensi dari Mahsun (2016:187) maka diperoleh hasil bahwa kinerja dari semua program maupun kegiatan Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo pada periode tahun 2018-2020 telah berjalan secara efisien. Dengan kata lain bahwa tiap-tiap kegiatan yang dilakukan efektif dalam pelaksanaan program yang diharapkan.

3.2.3 Analisis *Value For Money* elemen Efektivitas

Tabel 6. Pengukuran Efektivitas Pada BNN Provinsi Gorontalo Tahun 2018-2020

Tahun	Output (%)	Outcome (%)	Tingkat Efektivitas (%)	Kriteria
2018	115,10	113,28	98,41	Tidak Efektif
2019	105,28	106,50	101,15	Efektif
2020	114,08	114,97	100,78	Efektif

Sumber: LAKIP BNN Provinsi Gorontalo yang di olah

Selanjutnya, berdasarkan kriteria efektivitas menurut Mahsun (2016:87) jika nilai yang dihasilkan lebih dari 100% maka kinerja kegiatan tersebut dapat dikatakan efektif, jika nilai yang dihasilkan sama dengan 100% maka kinerja kegiatan tersebut dapat dikatakan efektif berimbang, dan jika nilai yang dihasilkan kurang dari 100% maka kinerja kegiatan tersebut dikatakan tidak efektif. Dengan demikian berdasarkan hasil yang ada pada Tabel 3 dan dikaitkan pada kriteria kinerja pengukuran efektivitas menurut (Mahsun 2016:186) maka diketahui bahwa dari program kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2018-2020, tahun 2019 dan tahun 2020 mendapat nilai lebih dari 100% yang artinya program tersebut telah berjalan dengan efektif. Namun, pada tahun 2018 mendapat nilai kurang dari 100% yang berarti tidak yang dimaksudkan tidak efektif diakibatkan oleh nilai *outcome* sebesar 113,38% lebih rendah dibandingkan dengan nilai *output* sebesar 115,10%, ini yang menyebabkan pada tahun 2018 mendapatkan nilai 98,41% yang berarti berada di bawah 100%. Hal itu disebabkan oleh target tujuan dari program yang telah ditetapkan, sementara realisasi dari kegiatannya tidak melebihi tujuan yang ingin dicapai.

Sehingga dapat diketahui bahwa secara keseluruhan program kegiatan pada tahun 2018-2020 Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo dalam menjalankan program kegiatan yang ada secara keseluruhan mendapatkan nilai efektif, dikarenakan adanya peningkatan tiap tahunnya dengan tetap mengevaluasi dan meningkatkan kinerja program yang kurang baik agar mendapatkan hasil yang maksimal pada tahun-tahun mendatang.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil pengukuran juga analisis dengan menggunakan pendekatan *Value For Money* yang terdiri dari rasio Ekonomi, Efisiensi, serta Efektivitas terhadap penelitian yang telah dilaksanakan oleh penulis di Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pada Rasio Ekonomi, seluruh laporan kinerja Badan Narkotika Nasional pada tahun 2018, 2019, dan 2020 menunjukkan ada pada tingkat ekonomis dikarenakan oleh seluruh presentase dari nilai ekonomis ada pada angka presentase di bawah 100%. Itu yang menunjukkan bahwa kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo telah menjalankan program/kegiatan pada tahun 2018-2020 secara ekonomis.

2. Pada Rasio Efisiensi, laporan kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo pada tahun 2018, 2019, dan 2020 menunjukkan berada pada tingkat efisien hal ini dikarenakan hasil keseluruhan dari presentase nilai efisiensi berada pada angka presentase di atas 100%. Sehingga menunjukkan bahwa kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo sudah melaksanakan program/kegiatan pada tahun 2018-2020 secara efisien.
3. Pada Rasio Efektivitas, laporan kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo pada tahun 2018 menunjukkan ada pada tingkat tidak efektif dengan angka presentase di bawah 100%. Sedangkan pada tahun 2019 dan 2020 menunjukkan ada pada tingkat efektif dalam melaksanakan program/kegiatan yang ada dikarenakan hasil keseluruhan dari presentase nilai efektivitas berada pada angka presentase di atas 100%. Sehingga menunjukkan bahwa kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo dari sisi efektivitas telah menjalankan program/kegiatan pada tahun 2018-2020 secara efektif karena adanya peningkatan tiap tahunnya.
4. Pada Metode *Value for Money*, Badan Narkotika Nasional dapat dinyatakan *Value for Money* karena Badan Narkotika Nasional sudah memenuhi kriteria/klasifikasi yang diukur dari tiap-tiap elemen dari *Value for Money* yaitu Ekonomis, Efisiensi, dan Efektivitas. Maka kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo dari sisi keseluruhan *Value for Money* telah menjalankan program/kegiatan pada tahun 2018-2020 secara baik.

Saran

Berdasarkan hasil pembahasan, untuk itu berikut adalah saran yang bisa dijadikan suatu bahan pertimbangan atau masukan yaitu:

1. Dapat mempertahankan kinerja untuk tahun-tahun yang akan datang, sehingga dapat meningkatkan nilai-nilai ekonomi, efisiensi, dan efektivitas pada tiap-tiap program kegiatan dan mampu mencapai tujuan serta sasaran yang diharapkan.
2. Diharapkan Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo dalam proses perencanaan anggaran sebaiknya mengevaluasi program/kegiatan yang ada pada periode sebelumnya dan dapat lebih memperhatikan penggunaan anggaran agar tidak terjadi pemborosan atau kurang maksimal pada program/kegiatan yang telah direncanakan, sehingga dengan anggaran yang telah dianggarkan dalam perencanaan anggaran terlaksananya program/kegiatan atau *output* secara lebih efisien lagi dan dapat mencapai *outcome* secara lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. 2015. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Edisi Cet Tujuh. Erlangga. Jakarta
- Dwinanda, Yosie. 2018. Analisis Value For Money Dalam Pengukuran Kinerja Pada Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Skripsi. Universitas Sanata Dharma.
- Fitriani. 2017. Analisis Value For Money Dalam Pengukuran Kinerja Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bulukumba. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Gare, Melchior Eugenndori. 2017. Analisis Pengukuran Kinerja Dengan Menggunakan Value For Money (Studi Kasus Pada Klinik Adhiwarga Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Daerah Istimewa Yogyakarta). Skripsi. Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
- Fauzi, A dan Hasanah, N, dan. 2017. Akuntansi Pemerintahan. Media. Bogor

- Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Jakarta.
- Mahsun, Muhamad. 2016. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Edisi Pertama. Cetakan Keenam. BPFE Anggota IKAPI. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2018. Akuntansi Sektor Publik. Edisi Pertama. Andi. Yogyakarta.
- Mahmudi. 2015. Manajemen Kinerja Sektor Publik. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Pancanugraha, Indra. 2018. Analisis Pengukuran Kinerja Dengan Menggunakan Pendekatan Value For Money Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Poso Tahun 2013-2014. *Jurnal Katalogis* 5(6): 20-27
- Purnairawan, E. dan S. Sastroadmodjo. 2021. Pengantar akuntansi. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Putri, Nur Zeni Amalia. 2020. Analisis Value For Money Pada Kinerja Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D). Alfabeta. Bandung
- Sujarweni, V. Wiranta. 2015. Akuntansi Sektor Publik Teori Konsep Aplikasi. Edisi Pertama. Cetakan Pertama. Pustaka Baru Press. Yogyakarta.